

INTISARI

Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Industri Hasil Tembakau di Kota Malang ditinjau dari Asas Akuntabilitas

Oleh : Veronica Ajeng Ayu Laras Gupita¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai dampak dari kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau yang memengaruhi keberlangsungan Industri Hasil Tembakau dan tenaga kerja di dalamnya dan akuntabilitas penggunaan DBHCHT oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya preventif bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan ekonomi lain selain bergantung dari produktifitas industri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang dilakukan yakni evaluatif dengan melakukan penilaian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dalam rangka pembatasan dan pengendalian konsumsi, pemerintah menggunakan sistem tarif cukai yang naik setiap tahunnya, kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau ini memengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau di Kota Malang. Pada realisasinya, tarif Cukai Hasil Tembakau akan lebih memberikan pengaruh signifikan terhadap produktifitas industri yang hanya memiliki segmen pasar yang sempit dan terbatas pada pasar dalam negeri. Hal tersebut disebabkan karena secara ilmu ekonomi, industri akan menanggung biaya yang lebih besar akibat intervensi dari kenaikan cukai dan konsumen yang lebih memilih produk lain dengan harga jauh lebih terjangkau atau produk dengan merk yang lebih tenar dengan kualitas yang jelas lebih bagus. Kedua, Pemerintah Daerah Kota Malang dalam penggunaan DBHCHT dinilai kurang. Hal tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan yang kurang terintegrasi dan kurangnya antusiasme dari tenaga kerja selaku subjek prioritas DBHCHT.

Kata kunci : Cukai, Kenaikan Cukai, DBHCHT, Akuntabilitas.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

The Impact of Excise Tariff Increase on Tobacco Products to Tax Revenue Share of Tobacco Products in Malang City Examined in Accountability Principle

By : Veronica Ajeng Ayu Laras Gupita²

The purpose of this study are to find the answer or explanation for the impact of excise tariff increase on tobacco products that affected tobacco industry, the employees in the industry, and the accountability of tax revenue share of tobacco products by the Local Government of the Malang City as a preventive action for the workers not to rely on the industries' productivity only.

This study is an empirical research. It is an evaluative research that assess anything related to the outcome of the research. Furthermore, this study used qualitative method, any showed data in this research are obtained from the observation on the fields and any documents that related to this study.

There are two conclusions out of this research. In order to restrict and to control the consumption of the tobacco, the Local Government increasing the excise tariff of the tobacco products annually that affected the industry itself. In reality, the excise tariff of the tobacco products will significantly affected the tobacco industries' productivity which already have small scope and limited in the domestic market only. On the economic perspective, the problems are generated because the industry will endure bigger cost from the excise tariff and the consumer who are leaning toward the cheaper, better quality tobacco products from the bigger industries. Lastly, the tax revenue share of tobacco products are not utilized properly that caused by the unintegrated excise tariff system and the workers as the priority subject of the tax revenue share are not interested of it.

Keyword: Tariff, Tariff Increase, Tax Revenue Share of Tobacco Products, Accountability.

² Undergraduate Student of Tax Law Departement in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.